

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini tumbuh cepat. Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang prinsip operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam. BMT di Indonesia dapat digolongkan pada koperasi jasa keuangan syariah yang memiliki hukum dan semua kegiatan operasionalnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Surat keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUM/IX/2004.¹

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya lembaga bait al-mal wa at-tamwil yakni lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek produksi dan investasi agar meningkatnya kualitas ekonomi dalam skala kecil menengah.² Banyak masyarakat orang muslim pada saat ini menginginkan lembaga jasa keuangan yang membantu dalam memenuhi kebutuhan seharinya sesuai dengan prinsip islami.

Dengan banyaknya kebutuhan nasabah yang beragam baik kebutuhan barang maupun jasa. Untuk memenuhi itu semua BMT mengeluarkan ataupun menawarkan produk pembiayaan multijasa. Penyaluran dana dalam bentuk multijasa dalam akad ijarah dan kafalah, bentuk pelayanan berupa pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pariwisata. Dengan mengambilnya transaksi ini

¹Muttaqien, Dadan. 2008. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2008), hlm. 61 .

² Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 34.

BMT mendapat imbalan berupa jasa (ujrah) atau fee yang diakui dalam bentuk nominal tidak dalam bentuk prosentennya. Akad yang diberikan oleh BMT umumnya menggunakan akad dominan pada aspek komersial dan aspek sosial. Dalam pendapat Nasution bahwasana pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan berbentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, usaha, dan lainnya.³

Berikut penelitian pada PT. BPR Syariah Asri Madani yang diteliti oleh Azizah mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian penerapan pembiayaan multijasa pada Fatwa No.44/DSN/-MUI/VII/2004 beberapa pernyataan menjelaskan bahwa bagi hasil, fee maupun ujarah yang diterapkan menggunakan prosentase bukan nominal dan dibuktikan yang lain bahwa pencatatan akuntansi mengacu pada ketentuan yang diberikan, adapun pengakuan dari PT. BPR Syariah Asri Madani bahwasannya penerapan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah ini belum sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut dikarenakan PT. BPR Syariah Asri Madani banyak yang belum terungkap penjelasan neraca dan penjelasan laba rugi yang penjelasannya sesuai dengan PSAK 107.⁴

Ketentuan tentang kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan ijarah multijasa diatur juga pada Fatwa DSN No.09/DSN/MUI/2000 mengenai pembiayaan ijarah, bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyediakan barang yang disewa ataupun jasa. Dijelaskan juga bahwa sewa atau

³Wangsawidjadja, 2012. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia, hlm.191

⁴Azizah, Arista Insaning. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara. *Skripsi S-1*. Jember: Universitas Jember.

upah adalah suatu yang dijanjikan dan harus dibayar oleh anggota lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Dalam penelitian ini fatwa yang digunakan adalah Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.⁵

KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memberikan pelayanan produk jasa pembiayaan multijasa. Hal ini di tawarkan karena banyak anggota yang membutuhkan untuk saat ini apalagi saat situasi Covid-19 seperti ini tanpa menghiraukan akad apapun karena yang digunakan sebagai tujuan utama adalah melakukan pembiayaan untuk mendapatkan dana. Pada pembiayaan ijarah mutijasa KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo menyerahkan sepenuhnya dana anggota untuk dimanfaatkan. Ketika melakukan akad pembiayaan pihak BMT akan membacakan juga memberikan informasi terkait pembayaran sewa atau ujah dalam bentuk nominal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah dengan judul “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Perspektif Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo.

⁵Dewan Syariah Nasional, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Nasional MUI* Jakarta:Erlangga, hlm.253.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu permasalahan yang dijadikan bahan skripsi adalah:

1. Bagaimana KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo menerapkan skema akad ijarah dalam pembiayaan ijarah multijasa?
2. Apakah penerapan akad ijarah dalam skema pembiayaan ijarah multijasa yang dilakukan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo sudah sesuai dengan fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah tersebut yang telah dirumuskan, maka dari itu tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui penerapan akad Ijarah Multijasa dalam skema pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo.
2. Mengetahui pembiayaan dengan prinsip Ijarah Multijasa di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta pendalaman dalam hal penerapan mengenai pembiayaan Ijarah Multijasa. Penelitian dapat digunakan juga untuk rujukan lebih lanjut bagi peneliti.

2. Secara Praktis

Bagi praktisi perbankan penelitian ini diharapkan mampu mengetahui semua pencatatan dan mekanisme penerapan pembiayaan Ijarah Multijasa. Dengan harapan produk yang sudah ada semakin bervariasi dengan penerapan tetap sesuai dengan prinsip syariah, yang membutuhkan lebih kusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian maka perlu diterapkan beberapa metode:

1. Jenis dan pendekatan

Berdasarkan skripsi yang telah diuraikan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Definisi dari pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan maupun dari bentuk tindakan kebijakan. Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan atau tempat BMT untuk melakukan pengamatan mengenai pembiayaan ijarah multijasa. Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial sesuai kondisi realitas natural setting yang holistik kompleks dan rinci.⁶

⁶Indrianto, N,& Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 88.

2. Tempat dan subjek penelitian

Berdasarkan penelitian ini peneliti akan mengambil penelitian KSPPS BMT Rejo sukomulyo untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk menjadi objek penelitian.

Subjek penelitian kualitatif ini untuk memperoleh sumber keterangan informasi data. Subjek penelitian merujuk pada 3 orang pegawai BMT dan 1 responden yang telah menggunakan jasa pembiayaan ijarah multijasa.

3. Metode pengumpulan data

a. Dalam metode pengumpulan data ini terdapat tiga jenis pengumpulan data:

1) Wawancara

Dalam proses pengumpulan data ini dilakukan dengan metode wawancara digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai analisis pembiayaan ijarah multijasa beserta penerapan maupun praktek pembiayaannya di KSPPS BMT Rejo sukomulyo. Maka akan didapatkan informasi yang akurat mengenai gambaran produk dari BMT.

2) Observasi

Proses pencatatan kegiatan obyek dan obyek tanpa adanya komunikasi dengan cara mengamati langsung transaksi pembiayaan.⁷

3) Dokumentasi

⁷ Indrianto, N, & Supomo, B. *Op.Cit*, hlm. 88.